

E-Government di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Dampaknya pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik

Zuchri Abdussamad^{1*}, Kisman Karinda², Erwin Nursin³, Fadli Sandewa⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo; zuchriabdussamad@yahoo.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Luwuk; kismankarinda35@gmail.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Luwuk; erwinein1975@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Luwuk; fadlisandewa1991@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan dampak implementasi e-government di Indonesia melalui analisis bibliometrik, dengan fokus pada pengembangan kajian administrasi publik. Metode penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dengan fokus pada evaluasi literatur terkait e-government di Indonesia. Pencarian dilakukan di database Scopus dengan kata kunci "E-government" dan "Indonesia", menghasilkan 93 dokumen relevan. Data tersebut diproses menggunakan alat analisis Vosviewer untuk pemetaan tren penelitian dan hubungan antar topik. Temuan studi ini menemukan bahwa penelitian terkait e-government di Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dan meningkatnya minat dalam memperkuat infrastruktur dan layanan publik digital. Faktor kunci dalam implementasi e-government mencakup kepemimpinan politik yang kuat dan penyesuaian dengan harapan masyarakat, sementara fokus pada tema implementasi e-government dan *website* pemerintah tetap penting untuk penelitian mendatang guna memahami tantangan dan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat pemahaman tentang implementasi e-government dan pelayanan publik di Indonesia, tetapi juga akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kajian administrasi publik yang lebih holistik dan berkelanjutan ke depannya.

Kata kunci: E-government, Layanan Publik, Administrasi Publik, Kepemimpinan Politik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.111>

*Correspondence: Zuchri Abdussamad

Email: zuchriabdussamad@yahoo.com

Received: date

Accepted: date

Published: date

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The purpose of this research is to evaluate the development and impact of e-government implementation in Indonesia through bibliometric analysis, focusing on the development of public administration studies. This research method uses bibliometric analysis with a focus on evaluating the literature related to e-government in Indonesia. A search was conducted in the Scopus database with the keywords "E-government" and "Indonesia", resulting in 93 relevant documents. The data was processed using the Vosviewer analysis tool for mapping research trends and relationships between topics. The findings of this study found that e-government-related research in Indonesia shows significant evolution and increasing interest in strengthening digital public infrastructure and services. Key factors in e-government implementation include strong political leadership and adjustments to public expectations, while the focus on the themes of e-government implementation and government websites remains important for future research to understand challenges and more effective strategies. Therefore, further research in this area is expected to not only strengthen the understanding of e-government implementation and public services in Indonesia, but will also provide a solid foundation for the development of more holistic and sustainable public administration studies in the future.*

Keywords: *E-Government, Public Service, Public Administration, Political Leadership*

Pendahuluan

E-government, atau pemerintahan elektronik, telah diadopsi di banyak negara sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik (Justice et al., 2006; Pribadi, 2021; Sarkar & Das, 2022). Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan secara online, seperti pembayaran pajak, pendaftaran bisnis, dan layanan kesehatan, yang memudahkan interaksi antara pemerintah dan warga negara. Implementasi e-government juga membantu dalam meminimalisir birokrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Ibrahim et al., 2023). Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Korea Selatan menjadi contoh sukses penerapan e-government, menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan (Burdenko & Bykasova, 2023; Espinosa & Pino, 2024; Kim & Lee, 2024).

Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, e-government juga berkontribusi pada penghematan biaya operasional bagi pemerintah dan masyarakat (Abualese et al., 2019; Bosio et al., 2023). Dengan mengurangi kebutuhan untuk proses manual dan kertas, e-government membantu menurunkan biaya administrasi dan mempercepat waktu pelayanan. Misalnya, layanan digital memungkinkan warga untuk mengurus dokumen resmi atau membayar tagihan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintahan secara fisik, yang menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, e-government mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan energi. Pada skala yang lebih besar, integrasi sistem digital di berbagai lembaga pemerintahan memungkinkan pertukaran data yang lebih efektif, mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan *real-time* (Mellouli et al., 2023; Ziolo et al., 2022).

Indonesia juga telah mengadopsi e-government sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Huda & Yunas, 2016; Roziqin et al., 2022; Sijabat, 2020). Melalui berbagai inisiatif seperti *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan (Pratiwi, 2020; Rifaid et al., 2023). Implementasi ini terlihat dalam berbagai layanan seperti e-KTP, layanan pajak online, serta portal pelayanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintahan secara digital. Adopsi e-government di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses administrasi, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus memperluas cakupan dan kualitas layanan e-government dengan mengembangkan berbagai aplikasi dan platform digital. Misalnya,

aplikasi "Lapor!" memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan dan saran terkait pelayanan publik secara langsung kepada instansi terkait, meningkatkan partisipasi dan responsivitas pemerintah (Pratama et al., 2023). Di bidang kesehatan, aplikasi seperti "PeduliLindungi" telah membantu dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan menyediakan informasi terkini dan pelacakan kontak (Pamungkas et al., 2023). Di tingkat daerah, banyak pemerintah provinsi dan kota juga meluncurkan portal layanan online untuk administrasi lokal, yang semakin memperluas akses warga terhadap layanan publik (Baharuddin, Qodir, et al., 2022; Machmud et al., 2020). Dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui interaksi yang lebih terbuka dan responsif.

Implementasi e-government di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama dalam upaya modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. E-government, sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, menawarkan berbagai peluang untuk memperbaiki kinerja administrasi publik melalui otomatisasi proses, pengurangan birokrasi, dan peningkatan akses informasi bagi masyarakat. Implementasi e-government tidak hanya membuka peluang untuk transformasi administrasi publik, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan dengan masyarakatnya melalui layanan yang lebih efektif dan akses yang lebih mudah. Dengan terus mendorong pengembangan dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, adopsi e-government di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, e-government tidak hanya mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat partisipasi publik. Contoh sukses dari negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Korea Selatan menginspirasi implementasi serupa di Indonesia, di mana inisiatif seperti SPBE dan berbagai aplikasi digital terus dikembangkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Melalui upaya ini, e-government berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih efektif dan responsif antara pemerintah dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun adopsi e-government telah menjadi subjek penelitian yang luas di banyak negara, terdapat *research gap* signifikan dalam kajian yang secara spesifik mendiskusikan implementasinya di Indonesia. Kebanyakan penelitian saat ini berfokus pada negara-negara yang telah lebih dahulu sukses menerapkan e-government, seperti Estonia,

Singapura, dan Korea Selatan. Sementara itu, studi yang mendalam dan komprehensif mengenai kasus Indonesia masih terbatas, terutama dalam konteks pemahaman terhadap dokumen-dokumen publikasi terbaru dan analisis implementasi lokal. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih fokus pada upaya adopsi e-government di Indonesia, guna menyediakan wawasan yang lebih spesifik dan relevan bagi pengembangan kebijakan serta praktik di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi e-government di Indonesia dengan penekanan khusus pada analisis dokumen-dokumen publikasi yang relevan. Melalui pendekatan analisis bibliometrik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tema penelitian terkait e-government di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak implementasi e-government pada pengembangan kajian administrasi publik, dengan harapan memberikan wawasan yang mendalam bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia.

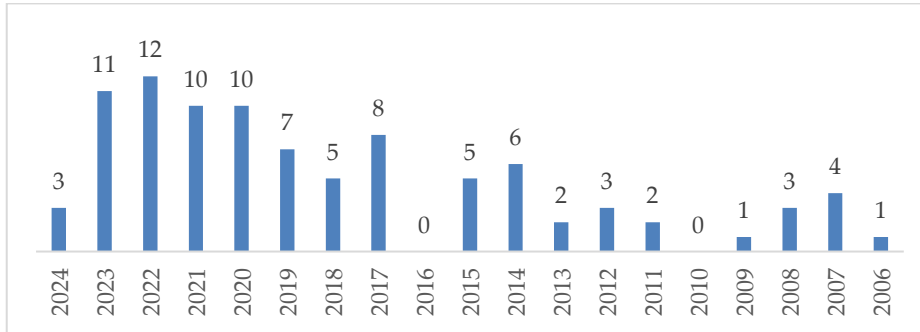
Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis bibliometrik, dengan fokus pada evaluasi literatur terkait e-government di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan berasal dari database Scopus, di mana pencarian dilakukan menggunakan kata kunci "E-government" dan "Indonesia" pada judul dokumen. Dari hasil pencarian tersebut, ditemukan sebanyak 93 dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai jenis publikasi seperti artikel jurnal, konferensi, dan makalah teknis yang menyediakan informasi komprehensif mengenai berbagai aspek e-government di Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dipindahkan ke dalam alat analisis Vosviewer untuk pemetaan dan visualisasi jaringan penelitian. Vosviewer digunakan untuk mengidentifikasi tren penelitian, hubungan antara berbagai topik, serta kolaborasi antara peneliti dan institusi. Dengan menggunakan analisis bibliometrik ini, penelitian dapat mengungkapkan pola distribusi pengetahuan, topik yang paling banyak diteliti, dan gap penelitian yang masih ada (Malik et al., 2023). Hasil analisis ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi e-government yang lebih efektif dan efisien di Indonesia, serta memandu penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Hasil dan Pembahasan

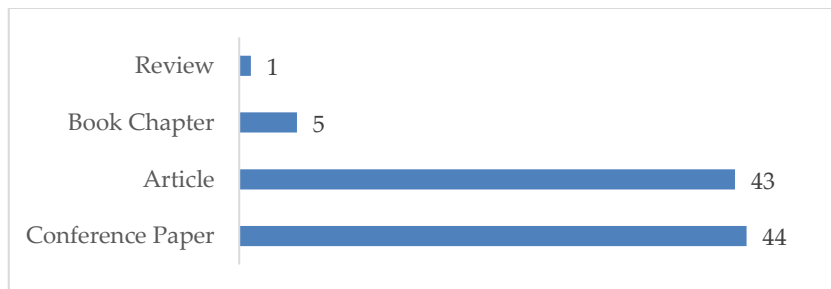
Mengetahui evolusi penelitian terkait e-government di Indonesia berdasarkan jumlah dokumen per tahunnya sangat penting untuk memahami perkembangan dan tren dalam bidang ini. Adapun jumlah dokumen terkait berdasarkan tahun publikasinya dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Total dokumen terkait e-government di Indonesia berdasarkan tahun publikasinya.

Sumber: Scopus, 2024

Gambar 1 menunjukkan total dokumen terkait e-government di Indonesia berdasarkan tahun publikasinya dari tahun 2006 hingga 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah publikasi berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Puncak jumlah publikasi terjadi pada tahun 2022 dengan 12 dokumen, diikuti oleh tahun 2023 dengan 11 dokumen dan tahun 2021 serta 2020 masing-masing dengan 10 dokumen. Terdapat penurunan jumlah publikasi pada tahun 2016 dan 2010 di mana tidak ada dokumen yang diterbitkan. Jumlah dokumen mulai menunjukkan peningkatan konsisten sejak tahun 2017, mencerminkan minat yang meningkat terhadap penelitian e-government di Indonesia. Data ini mengindikasikan tren naik dalam penelitian e-government yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik.



Gambar 2. Total dokumen terkait e-government di Indonesia berdasarkan jenis dokumen.

Sumber: Scopus, 2024

Gambar 2 menggambarkan distribusi jenis dokumen terkait e-government di Indonesia, menyoroti dominasi *conference papers* dan *articles* dengan masing-masing 44 dan 43 dokumen. Kedua jenis ini mencerminkan fokus yang kuat pada penelitian dan pembaruan dalam ranah e-government di Indonesia. Selain itu, terdapat juga lima *book*

chapters yang mungkin mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih dalam, serta satu review yang mungkin memberikan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada. Kombinasi berbagai jenis dokumen ini menawarkan wawasan yang kaya dan mendalam terhadap perkembangan dan diskusi seputar e-government di Indonesia.

Dari analisis data yang disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait e-government di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam jumlah publikasi terkait e-government sejak tahun 2017, mencerminkan minat yang meningkat dalam penelitian ini. Selain itu, Gambar 2 menggambarkan dominasi *conference papers* dan *articles* dalam literatur e-government, menyoroti fokus yang kuat pada penelitian dan pembaruan dalam ranah ini. Kedua gambaran ini menunjukkan tren positif dalam pengembangan dan pemahaman e-government di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam memperkuat infrastruktur e-government dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Selain itu, evolusi diskusi seputar e-government di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah sitasi dominan. Dokumen yang sering disitasi menandakan pentingnya dan relevansinya dalam literatur atau penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu. Sitasi yang tinggi dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman, teori, atau praktik dalam bidang yang relevan (Baharuddin, Nurmandi, et al., 2022; Haris et al., 2023; Karinda et al., 2024). Adapun dokumen dengan sitasi tertinggi dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Total dokumen terkait e-government di Indonesia yang dominan disitasi.

Judul	Tahun	Sitasi
E-government challenges and the role of political leadership in Indonesia: The case of Sragen	2008	85
Perspectives of citizens towards e-government in Thailand and Indonesia: A multigroup analysis	2008	55
The critical factors affecting e-government adoption in indonesia: A conceptual framework	2017	48
Enhancing the implementation of e-Government in indonesia through the high-quality of virtual community and knowledge portal	2006	48

Judul	Tahun	Sitasi
Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia	2020	32

Sumber: Scopus, 2024

Temuan utama dalam studi pertama adalah bahwa kepemimpinan politik yang kuat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan e-government di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan seperti Sragen. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara keseluruhan mengalami kesenjangan besar dalam implementasi e-government antar kabupaten, keberhasilan Sragen dalam menerapkan e-government secara efektif menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan politik yang kuat, tantangan dalam pengelolaan, infrastruktur, dan faktor manusia dapat diatasi (Furuholt & Wahid, 2008). Temuan ini menggambarkan pentingnya dukungan politik dalam mendorong inovasi dan perkembangan e-government di seluruh Indonesia, dengan memperhatikan contoh kesuksesan seperti yang terjadi di Sragen untuk diadopsi dan diadaptasi di tempat lain.

Temuan utama dalam studi kedua adalah bahwa meskipun Thailand dan Indonesia sama-sama masih dalam tahap awal implementasi e-government, perspektif warga negara terhadap e-government memiliki perbedaan yang signifikan antara kedua negara tersebut. Salah satu perbedaan kunci adalah bahwa di Thailand, pentingnya layanan transaksi keuangan secara negatif berkaitan dengan identifikasi warga dengan situs e-government, sedangkan di Indonesia hubungan ini tidak signifikan (Mirchandani et al., 2008). Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah kedua negara untuk merencanakan layanan e-government yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan warganya. Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini memperlihatkan bahwa prioritas layanan e-government dapat berbeda dari negara lain, dan pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kesesuaian dan efektivitas layanan e-government di masa depan.

Temuan utama dalam studi ketiga adalah identifikasi faktor-faktor kritis yang memengaruhi adopsi e-government di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa aspek teknologi, tata kelola, dan sosial menjadi hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dengan cermat dalam mengadopsi e-government. Dengan menggunakan teknik bibliometrik, studi ini menyelidiki berbagai sumber untuk menyusun analisis yang komprehensif. Beberapa variabel dependen seperti kualitas informasi, kepercayaan, dan kualitas sistem juga diintegrasikan dengan konstruk teori penerimaan dan penggunaan teknologi yang terpadu sebagai variabel yang memengaruhi adopsi e-government. Hasilnya, studi ini merumuskan kerangka konseptual berdasarkan pengalaman yang ada dan hubungan-hubungannya (Witarsyah et al., 2017). Temuan ini memberikan pandangan

yang berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi e-government yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung inovasi teknologi di sektor pemerintahan.

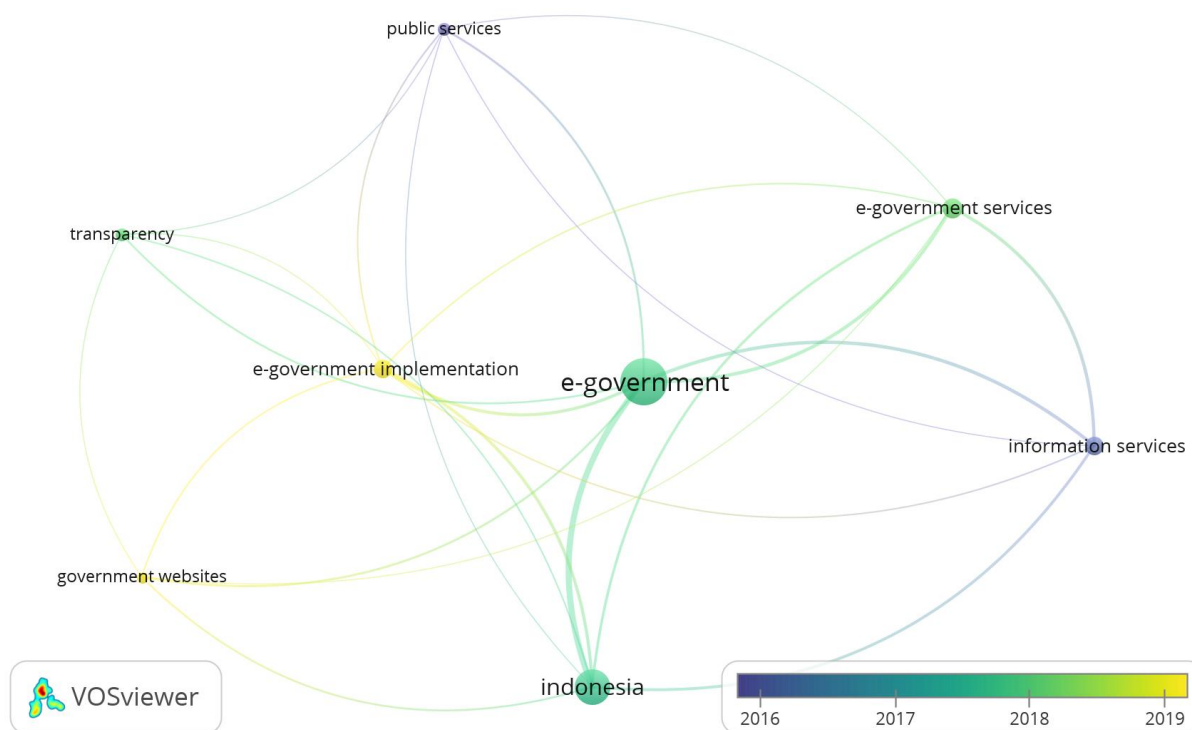
Penelitian keempat menyoroiti bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan e-government terutama disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dasar, penetrasi komputer, kebijakan, dan regulasi, serta kekurangan kepemimpinan dalam e-government. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembentukan komunitas virtual dan portal pengetahuan sebagai solusi. Komunitas virtual tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses berbagi pengetahuan dan transfer informasi antar pemangku kepentingan, sehingga menciptakan lingkungan virtual yang berkualitas tinggi (Pamoragung et al., 2006). Rangkaian konsep e-government dan manajemen pengetahuan yang diusulkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam memperbaiki infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan e-government, serta memperkuat kerangka regulasi yang mendukung inovasi dan pertukaran pengetahuan.

Dokumen kelima menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan transparansi adalah faktor-faktor kritis dalam mengevaluasi adopsi e-government oleh warga negara di Indonesia. Selain itu, transparansi ditemukan sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan warga negara Indonesia untuk mengadopsi e-government. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia tentang bagaimana adopsi e-government dapat ditingkatkan, sambil memperluas penggunaan model UTAUT dengan faktor transparansi yang vital dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia (Sabani, 2020). Studi ini memberikan kontribusi signifikan sebagai studi pertama yang memperluas dan menguji model UTAUT dengan transparansi dalam mengevaluasi adopsi e-government dari sudut pandang warga negara di Indonesia, menyoroiti pentingnya transparansi dalam pemahaman adopsi e-government dalam konteks tersebut.

Secara keseluruhan, temuan dari studi-studi tersebut menyoroiti beberapa aspek kunci yang relevan dalam konteks implementasi e-government di Indonesia. Pertama, pentingnya kepemimpinan politik yang kuat terbukti menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan e-government, terutama di daerah pedesaan seperti Sragen. Kedua, pemahaman akan perbedaan perspektif warga negara terhadap e-government antara Thailand dan Indonesia menekankan pentingnya penyesuaian layanan e-government dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, identifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi adopsi e-government, seperti aspek teknologi, tata kelola, dan sosial, memberikan panduan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi e-

government yang lebih efektif. Keempat, penekanan pada pentingnya transparansi dalam adopsi e-government menyoroti perlunya peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan di Indonesia. Implikasi praktis dari temuan-temuan ini adalah bahwa pemerintah Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola program e-government agar dapat mencapai keberhasilan yang optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Temuan-temuan dari studi-studi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi e-government di Indonesia. Pertama, penekanan pada pentingnya kepemimpinan politik yang kuat menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik lokal dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan e-government. Kedua, pemahaman akan perbedaan perspektif warga negara antara Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan layanan e-government harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat agar lebih efektif. Ketiga, identifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi adopsi e-government, seperti aspek teknologi, tata kelola, dan sosial, memberikan landasan bagi pengembangan strategi e-government yang lebih holistik dan berkelanjutan. Keempat, penekanan pada transparansi dalam adopsi e-government menyoroti pentingnya akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, temuan-temuan ini memberikan panduan yang berharga bagi penelitian dan praktik administrasi publik di Indonesia dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola program e-government guna meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.



Gambar 3. Tema penelitian terkait e-government di Indonesia.

Sumber: Diolah peneliti dengan Vosviewer, 2024

Gambar 3 menggambarkan beragam tema penelitian terkait e-government di Indonesia, di antaranya adalah *e-government implementation* (implementasi e-government) dan *government website* (Situs web pemerintah). Meskipun tema-tema lainnya telah mendapat perhatian yang cukup, implementasi e-government masih memerlukan kajian mendalam karena terbatasnya diskusi yang terfokus pada topik ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memahami tantangan, strategi, dan dampak dari implementasi e-government di Indonesia. Dengan mengarahkan perhatian lebih lanjut pada tema ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur e-government dan meningkatkan efektivitas layanan publik di Indonesia.

Implementasi e-government merupakan tahap kritis dalam transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proses implementasi ini melibatkan berbagai langkah, termasuk perancangan infrastruktur teknologi yang memadai, pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, serta pengaturan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, implementasi e-government sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terampil, resistensi terhadap perubahan dari pihak internal pemerintah, serta ketidakmampuan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat dan efisien (Abdurahman & Kabanda, 2024; Koniyo et al., 2023; Terrance, 2023).

Salah satu komponen utama dari e-government adalah *website* pemerintah, yang menjadi titik akses utama bagi warga negara untuk mendapatkan informasi, layanan, dan berinteraksi dengan pemerintah secara online (Faizin et al., 2024; Ramadhani et al., 2024). Melalui *website* pemerintah, individu dapat mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan layanan pemerintah, serta melakukan transaksi online seperti pembayaran pajak, pendaftaran perizinan, dan pengajuan dokumen. Dengan demikian, *website* pemerintah merupakan salah satu alat utama dalam transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, keberhasilan implementasi e-government juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, seperti dukungan politik yang kuat, keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan privasi data mereka (Feleke & Lessa, 2023; Ibrahim et al., 2023; Kumar et al., 2023). Oleh karena itu, strategi implementasi e-government yang berhasil harus memperhatikan aspek-aspek teknis dan non-teknis secara holistik. Di Indonesia, upaya untuk mengimplementasikan e-government telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal koordinasi antarlembaga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan-layanan digital pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implementasi e-government menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas.

Simpulan

Dari analisis terhadap perkembangan penelitian terkait e-government di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, terjadi evolusi yang signifikan dalam minat dan fokus pada topik ini. Penelitian terkait e-government di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan minat yang meningkat dalam memahami dan meningkatkan implementasi e-government di negara ini. Fokus utama

penelitian ini adalah pada penelitian dan pembaruan dalam ranah e-government, yang menandakan upaya untuk terus memperkuat infrastruktur e-government dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan transformasi digital pemerintahan.

Temuan studi ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan politik dan penyesuaian layanan e-government dengan harapan masyarakat sebagai faktor kunci dalam implementasi e-government di Indonesia, sementara identifikasi faktor kritis seperti aspek teknologi dan transparansi memberikan panduan bagi pemerintah dalam merancang strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan aspek-aspek ini dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan. Adapun tema penelitian yaitu implementasi e-government dan situs *website* pemerintah tetap menjadi fokus penting dalam penelitian terkait e-government di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa perhatian pada topik ini, masih ada kebutuhan akan kajian mendalam untuk memahami tantangan, strategi, dan dampak dari implementasi e-government secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur e-government dan meningkatkan efektivitas layanan publik di Indonesia dengan mengarahkan perhatian lebih lanjut pada tema ini.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, S., & Kabanda, S. (2024). Factors influencing the design and implementation of accessible e-Government services in South Africa. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, May, 12317. <https://doi.org/10.1002/isd2.12317>
- Abualese, H., Al-Rousan, T., & Al-Shargabi, B. (2019). A New Trust Framework for E-Government in Cloud of Things. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 65(3), 397–405. <https://doi.org/10.24425/ijet.2019.129791>
- Baharuddin, T., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation: Examining Contributions to the Case of Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5(1), 17–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19468>
- Baharuddin, T., Qodir, Z., & Loilatu, M. J. (2022). Government Website Performance during Covid-19: Comparative Study Yogyakarta and South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 109–123. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.11474>
- Bosio, E., Hayman, G., & Dubosse, N. (2023). The Investment Case for E-Government Procurement: A Cost-Benefit Analysis. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 14(May), 81–107.

- <https://doi.org/10.1017/bca.2023.10>
- Burdenko, E. V., & Bykasova, E. V. (2023). E-government models and application of digital technologies for tax administration. *Governance as a Catalyst for Public Sector Sustainability*, May, 71–96. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6966-8.ch004>
- Espinosa, V. I., & Pino, A. (2024). E-Government as a Development Strategy: The Case of Estonia. *International Journal of Public Administration*, May, 2316128. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2316128>
- Faizin, M. A., Nevin, M., & Yuhana, U. L. (2024). Indonesia E-Government Website Performance and Accessibility Evaluation using Automated Tool Lighthouse. *2024 2nd International Conference on Software Engineering and Information Technology, ICoSEIT 2024*, May, 210–215. <https://doi.org/10.1109/ICoSEIT60086.2024.10497521>
- Feleke, H., & Lessa, L. (2023). Maturity as a critical sustainability factor for e-government: Toward a conceptual framework. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, May, 12308. <https://doi.org/10.1002/isd2.12308>
- Furuholt, B., & Wahid, F. (2008). E-government challenges and the role of political leadership in Indonesia: The case of Sragen. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, May, 2024. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2008.134>
- Haris, A., Tahir, S., Nurjaya, M., & Baharuddin, T. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 314–324.
- Huda, M., & Yunas, N. S. (2016). The Development of E-Government In Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.97-108>
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis of E-Government and Trust : A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 269–284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>
- Justice, J. B., Melitski, J., & Smith, D. L. (2006). E-government as an instrument of fiscal accountability and responsiveness: Do the best practitioners employ the best practices? *American Review of Public Administration*, 36(3), 301–322. <https://doi.org/10.1177/0275074005283797>
- Karinda, K., Baharuddin, T., & Jermisittiparsert, K. (2024). Exploring Global Research Trends in Sports Tourism Policy: Formulating Indonesia's Future Policies. *Journal of Government Civil Society*, 8(1), 91–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v8i1.10123>
- Kim, Y., & Lee, J. (2024). Digitally vulnerable populations' use of e-government services: inclusivity and access. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, May, 23276665.

- <https://doi.org/10.1080/23276665.2024.2321569>
- Koniyo, M. H., Giriantari, I. A. D., Sudarma, M., & Wirastuti, N. M. A. E. D. (2023). Electronic government system measurement model: a systematic testing of e-government implementation. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 32(2), 845–856. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v32.i2.pp845-856>
- Kumar, R., Sachan, A., & Mukherjee, A. (2023). Adoption of e-government services at different maturity levels: a qualitative study in India. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 25(1), 15–39. <https://doi.org/10.1108/DPRG-09-2021-0116>
- Machmud, M., Masmuh, A., Nasirin, C., Salahudin, Baharuddin, T., & Musa, A. E. Z. (2020). Artificial Intelligence In The Public Health Sector: The Use Of Telemedicine In Indonesia During Covid-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 10106–10118.
- Malik, I., Prianto, A. L., Roni, N. I., Yama, A., & Baharuddin, T. (2023). Multi-level Governance and Digitalization in Climate Change: A Bibliometric Analysis. In S. Motahhir & B. Bossoufi (Eds.), *International Conference on Digital Technologies and Applications* (pp. 95–104). Springer, Cham.
- Mellouli, M., Bentahar, O., Boudabbous, S., & Subramanian, N. (2023). Sustainable value creation by adopting an e-government initiative: empirical evidence from the emerging economy context. *International Review of Public Administration*, 28(1), 19–44. <https://doi.org/10.1080/12294659.2023.2170774>
- Mirchandani, D. A., Johnson, J. H., & Joshi, K. (2008). Perspectives of citizens towards e-government in Thailand and Indonesia: A multigroup analysis. *Information Systems Frontiers*, 10(4), 483–497. <https://doi.org/10.1007/s10796-008-9102-7>
- Pamoragung, A., Suryadiand, K., & Ramdhani, M. A. (2006). Enhancing the implementation of e-Government in indonesia through the high-quality of virtual community and knowledge portal. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, May*, 341–348.
- Pamungkas, S. H. A., Prasetyo, K., & Walinegoro, B. G. (2023). Public Security vs Personal Privacy: Analysis of PeduliLindungi from Open Government and Surveillance State Perspectives. *KnE Social Sciences*, 2023, 601–623. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13026>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v4.i1.p78-96>
- Pratiwi, P. (2020). Menuju Pemerintahan Elektronik Yang Transformatif. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*.

- <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.689>
- Pribadi, U. (2021). Citizens' intention to use e-government services: The case of e-complaint service in Indonesia. *International Journal of Electronic Governance*, 13(2), 114–131. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2021.116884>
- Ramadhani, E. H., Suyitno, D., & Suryantoro, S. (2024). Information Technology Security Assessment (ITSA) Methodology for Web-Based E-Government. *AIP Conference Proceedings*, 2838(1), 179775. <https://doi.org/10.1063/5.0179775>
- Rifa'id, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City: Indonesian Government Plans. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141>
- Roziqin, A., Kismartini, Fajrina, A. N., Salahudin, & Sulistyaningsih, T. (2022). The development of Indonesian e-Government: A bibliometric analysis. *COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management*, 16(1), 49–74. <https://doi.org/10.1080/09737766.2021.2007036>
- Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>
- Sarkar, S., & Das, S. (2022). Fuzzy based security risk assessment of e-government data centre in Indian context. *Electronic Government*, 18(3), 354–380. <https://doi.org/10.1504/EG.2022.123838>
- Sijabat, R. (2020). Analysis of e-government services: A study of the adoption of electronic tax filing in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 179–197. <https://doi.org/10.22146/jsp.52770>
- Terrance, M. T. (2023). Assessing the e-readiness of e-government Implementation in South African Municipalities. *Journal of African Films and Diaspora Studies*, 6(4), 135–156. <https://doi.org/10.31920/2516-2713/2023/6n4a7>
- Witarsyah, D., Sjafrizal, T., Fudzee, M. F. M., & Salamat, M. A. (2017). The critical factors affecting e-government adoption in indonesia: A conceptual framework. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 7(1), 160–167. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.7.1.1614>
- Zioło, M., Niedzielski, P., Kuzionko-Ochrymiuk, E., Marcinkiewicz, J., Łobacz, K., Dyl, K., & Szanter, R. (2022). E-Government Development in European Countries: Socio-Economic and Environmental Aspects. *Energies*, 15(23), 15238870. <https://doi.org/10.3390/en15238870>